

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan sektor pariwisata dalam mendorong pembangunan nasional Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Sebagai salah satu kontributor terbesar penerimaan devisa negara, sektor pariwisata menempati posisi penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara ekonomi makro, kegiatan pariwisata bisa menciptakan permintaan barang dan jasa, baik untuk konsumsi maupun investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan berbagai lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran di berbagai daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Menurut data kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 lalu sebesar 4,7 %, kontribusi devisa sektor pariwisata mencapai US\$16,9 miliar, dan penyerapan tenaga kerja pariwisata sebanyak 14,96 juta orang (Kemenparekraf.go.id, 2020).

Mengingat penting dan strategisnya industri pariwisata dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan, maka pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif terus berupaya untuk mengembangkan industri pariwisata tanah air melalui berbagai kebijakan dan strategi. Dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 - 2024, pemerintah menetapkan pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu 1) Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, 2) Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 3) Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 4) Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta 5) Pilar Kreativitas. Selanjutnya kelima pilar tersebut dijabarkan ke dalam 7 arah kebijakan strategis pariwisata nasional yang salah satunya adalah

tentang peningkatan kualitas SDM, yaitu “Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimalisasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. (kemenparekraf.go.id, 2019).

Berdasarkan 5 pilar strategis pariwisata dan 7 arah kebijakan strategis pariwisata nasional tersebut, diketahui bahwa faktor SDM pariwisata dan lembaga pendidikan pariwisata menjadi salah satu faktor yang mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan kualitasnya. Dimasukkannya faktor SDM dan lembaga pendidikan pariwisata dalam pilar dan arah kebijakan strategis pembangunan pariwisata nasional menunjukkan pentingnya kedua faktor ini dalam pembangunan industri pariwisata nasional yang berkualitas dan berdaya saing internasional. Pemerintah menyadari bahwa keunggulan alam sebagai destinasi wisata yang dimiliki Indonesia tidak akan bisa optimal apabila tidak dikelola oleh SDM yang handal di bidangnya. Keberadaan SDM pariwisata yang handal, profesional, kreatif, inovatif dan bersertifikat kompetensi merupakan salah satu kunci keberhasilan industri pariwisata di era globalisasi seperti saat ini.

Pariwisata merupakan industri jasa yang dalam pengelolaannya sangat bergantung pada keberadaan manusia. Dalam menawarkan produk dan jasa wisata aspek manusia memiliki peran yang sangat menonjol, sehingga keberadaan SDM pariwisata yang kompeten sangatlah diperlukan untuk kelangsungan industri pariwisata. Berkaitan dengan hal ini, Chusmeru, seorang pengamat pariwisata dari Universitas Jendral Soedirman, menyatakan bahwa pariwisata adalah industri jasa yang bertumpu pada pelayanan, sehingga kualitas dan kapasitas SDM sektor pariwisata sangatlah penting. Untuk bisa berkompetisi dengan Negara lain yang sudah lebih dulu maju industri pariwisatanya, maka Indonesia perlu SDM yang unggul di bidangnya. (Rahman, 2019 hlm. 13)

Potensi keunggulan destinasi wisata, berupa keindahan alam maupun keunikan budaya yang dimiliki Indonesia saat ini disinyalir belum dikelola secara optimal sebagai sebuah daya tarik wisata yang bisa mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini mengakibatkan daya saing pariwisata Indonesia dianggap masih rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia bahkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Berdasarkan Laporan The Travel & Tourism Competitiveness Report yang dirilis WEF (World Economic Forum) tahun 2019 tentang peringkat indeks daya saing pariwisata, Indonesia berada di peringkat 40 dari 140 negara di dunia. Di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), indeks daya saing pariwisata Indonesia tersebut berada di peringkat 4, masih di bawah Singapore, Malaysia, dan Thailand. Sementara untuk indeks daya saing SDM Pariwisata, The Travel & Tourism Competitiveness Report tahun 2019, menempatkan Indonesia pada posisi nomor 44 di antara 140 negara di dunia, dan nomor 5 di antara negara negara ASEAN. (Word Economic Forum, 2019). Selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Indeks Daya Saing Keunggulan Pariwisata dan SDM Pariwisata Dunia untuk Negara Negara di Kawasan ASEAN Tahun 2019

| No. | Nama Negara | Daya Saing Keunggulan Pariwisata | Daya Saing SDM Pariwisata |
|-----|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | Singapura | 17 | 5 |
| 2. | Malaysia | 29 | 15 |
| 3. | Thailand | 31 | 27 |
| 4. | Indonesia | 40 | 44 |
| 5. | Cambodia | 54 | 95 |
| 6. | Viet Nam | 63 | 47 |
| 7. | Brunei Darussalam | 72 | 69 |
| 8. | Philippines | 75 | 37 |

Sumber: The Travel & Tourism Competitiveness Report, Word Economic Forum

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa di kawasan Negara ASEAN, posisi daya saing keunggulan pariwisata Indonesia menempati posisi keempat, sementara daya saing SDM pariwisatanya pada posisi kelima, lebih rendah satu peringkat dibanding keunggulan pariwisatanya. Artinya bahwa keunggulan

Deden Saepudin, (2023)

MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

pariwisata yang dimiliki Indonesia belum didukung oleh keunggulan SDM pariwisatanya. Berbeda dengan Negara Philippines, keunggulan pariwisatanya no.75 di dunia tetapi keunggulan SDM pariwisatanya no. 37, lebih baik dibanding SDM pariwisata Indonesia. Salah satu indikator rendahnya keunggulan SDM Pariwisata Indonesia adalah pada aspek kemudahan mencari karyawan yang terampil (*ease of finding skilled employees*). Pada aspek ini Indonesia berada pada urutan 35, jauh di bawah Philipines yang berada di urutan 20, bahkan termasuk di bawah India. (reforts.weforum.org. 2019).

Kondisi masih rendahnya SDM pariwisata Indonesia juga dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang sudah tersertifikasi profesi dari BNSP. Hal ini disampaikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata RI tahun 2019. Disebutkan bahwa selama tahun 2019 jumlah SDM Pariwisata nasional yang terdaftar ada sebanyak 3.900.000 orang sedangkan jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi hanya sejumlah 177.591 orang. Rasio perbandingannya sekitar 4,5 %. Sungguh merupakan angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah SDM Kepariwisataan yang tersertifikasi tahun 2019

| No. | Bidang Sertifikasi | Jumlah |
|-----|--|---------|
| A. | Sertifikasi Industri | 70.000 |
| 1. | Bidang Hotel dan Restoran | 53.490 |
| 2. | Bidang Kepemanduan Wisata | 6.558 |
| 3. | Bidang Spa | 6.059 |
| 4. | Bidang Biro Perjalanan Wisata (BPW) | 3.393 |
| 5. | Bidang Mice | 500 |
| B | Sertifikasi Pendidikan | 2.136 |
| C | Sertifikasi Mandiri LSP P1/P3 | 35.455 |
| | Total Jumlah SDM kepariwisataan tersertifikasi | 177.591 |

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata RI tahun 2019

Menyikapi kenyataan masih rendahnya daya saing atau kualitas SDM pariwisata Indonesia saat ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi seperti ini tidak bisa terus

Deden Saepudin, (2023)

MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

berlanjut, perlu dicarikan penyebab dan solusinya. Secara teoritis hal ini bisa terjadi akibat banyak faktor, salah satunya adalah faktor kualitas pendidikan. Banyak pakar menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan individu dalam melakukan tugas pekerjaannya sehingga bisa lebih produktif dan mampu bersaing dengan yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya kemampuan suatu bangsa dalam melakukan persaingan dengan bangsa lainnya dapat dilihat dari faktor kualitas penyelenggaraan pendidikannya. Salah satu instrument yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu SDM suatu bangsa adalah dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas. Hal ini diungkapkan dalam teori *Human Capital Investment* yang dikemukakan oleh Schultz (1961) dan Becker, (1965), yang menyatakan bahwa pendidikan dijadikan sebagai salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan pekerjaan dengan produktivitas tinggi sehingga bisa meraih tugas dan penghasilan yang tinggi pula.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat untuk mampu bertahan dan mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan kehidupan masa depannya yang terus berkembang dengan cepat. Berkaitan dengan hal ini, Fikrianto (2017, hlm.3) menyatakan bahwa Kondisi persaingan dan perkembangan industri yang begitu cepat, membutuhkan kontribusi pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Artinya bahwa pendidikan dijadikan sebagai tumpuan harapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang. Lebih jauh lagi, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berkualitas yang membekali peserta didiknya dengan kemampuan mengembangkan diri secara relevan dengan kemajuan jaman. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sa'ud (2012, hlm.9), bahwa kemajuan dan perubahan kehidupan sosial yang serba cepat ini merupakan tantangan atau masalah dalam pendidikan. Bagaimana menyiapkan dan mengembangkan peserta didik agar mereka mampu menghadapi kehidupan

modern, bagaimana kurikulum sekolah harus disusun agar relevan dengan tantangan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, bagaimana mendayagunakan fasilitas peralatan teknologi untuk mengefektifkan proses belajar. Metodologi apa yang tepat digunakan sesuai dengan perubahan pola kehidupan dewasa ini.

Kaitannya dengan SDM Pariwisata, maka pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas akan dapat dihasilkan melalui pendidikan pariwisata berkualitas yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pariwisata yang berkualitas pula. Sehingga kontribusi lembaga pendidikan pariwisata terhadap peningkatan kualitas SDM pariwisata adalah suatu keniscayaan. Upaya memperbaiki kualitas SDM pariwisata harus dimulai dari memperbaiki kualitas lembaga pendidikan pariwisatanya agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, yaitu pendidikan yang membekali peserta didiknya dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan industri pariwisata masa depan yang semakin modern dan terus berubah. Mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003, reputasi sebuah lembaga pendidikan berkualitas tergantung kepada kemampuan memenuhi persyaratan mutu maupun persyaratan umum dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. Pendidikan pariwisata yang lebih banyak bermuatan pendidikan vokasi (*vocational education*) mengajarkan keahlian terapan dan akademik. Mutu lulusan diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan keterampilan yang diperlukan oleh dunia industri. Keberhasilan lembaga pendidikan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemampuan akademik lulusan, tetapi juga oleh kesempatan yang terbuka bagi lulusannya untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di pasar kerja (*labour market*) dengan keterampilan yang dimiliki. Artinya lembaga pendidikan pariwisata tidak hanya menciptakan proses pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tetapi turut menjalin kerjasama dengan dunia industri untuk memasarkan lulusannya dan memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki lulusannya tersebut sesuai dengan

Deden Saepudin, (2023)

MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

kebutuhan industri pariwisata saat ini. Mereka siap bekerja bukan sekedar siap mencari pengalaman kerja atau siap *training*. Dengan demikian kualitas lulusan merupakan tolok ukur kualitas pendidikan di lembaga pendidikan pariwisata.

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi pariwisata memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing pariwisata. Dari sinilah akan lahir SDM pariwisata yang akan menjadi motor penggerak industri pariwisata. Permasalahan muncul ketika ada tuntutan dari dunia usaha dan dunia industri terhadap mutu lulusan yang siap kerja dan bukan sekedar siap *training*. Perlu diingat bahwa dalam pendidikan pariwisata sebagai salah satu pendidikan vokasi diperlukan penguatan keterampilan kerja yang lebih dibanding sekedar pemahaman teori atau ilmu pengetahuan saja. Terkait hal ini, Yusrintosepu (2017, hlm. 5). menyatakan bahwa pendidikan vokasi sejatinya membangun 8 kompetensi lulusan, yakni: *Communication Skills, Critical and Creative Thinking, Information/Digital Literacy, Inquiry/Reasoning Skills, Interpersonal Skills, Multicultural/Multilingual Literacy, Problem Solving, Technological Skills*. Dengan pendidikan vokasi yang efektif dan efisien ini diharapkan dapat menghasilkan calon tenaga kerja yang memiliki *soft skills* dan *hard skills* dengan kemampuan berfikir kritis dan ketrampilan dalam memecahkan masalah untuk menghadapi dunia kerja dalam era globalisasi seperti saat ini. Berkaitan dengan hal ini, Sutono (2016, hlm 10) mengungkapkan bahwa pendidikan tinggi pariwisata akan menghasilkan 1) *Educated and Knowledgeable People* yang sesuai dengan kebutuhan dunia pariwisata, 2) Mampu menghasilkan dan melakukan *qualified* dan *applied research* sehingga bermanfaat langsung dalam kehidupan masyarakat, 3) Menghasilkan pemimpin yang berkarakter, *valued leaders*.

Hasil penelitian Green (2007, hlm. 122) mempertegas pernyataan di atas. Ia menyatakan "*Twelve of the management competencies were perceived to be used frequently by hospitality and tourism graduates*". Bahwa terdapat 12 kompetensi manajerial yang akan sering diperlukan oleh para lulusan pendidikan perhotelan dan pariwisata. Lebih lanjut ia menyatakan dari ke-12 kompetensi yang diperlukan tersebut, keterampilan interpersonal menempati urutan yang paling

tinggi (peringkat 4) sebagai sebuah keterampilan managerial yang harus dimiliki para lulusan pendidikan pariwisata dibanding dengan keterampilan teknis lainnya Senada dengan pernyataan Green, hasil penelitian Whitelaw (2009, hlm 1) menunjukkan bahwa disamping keterampilan manajemen umum, keterampilan dan kompetensi managerial secara teknis menjadi penting untuk dimiliki oleh lulusan pendidikan perhotelan, sebagai cerminan dari kebutuhan industri pariwisata. Sebagaimana pernyataannya:

To reflect the need of the industry, it is important to define the skills and competencies expected from any hospitality graduate. There is indeed a clear shift in hospitality education where general management skills are introduced to complement the practical components.

Mengingat hal tersebut, maka kewajiban semua pihak untuk membantu mendorong lembaga pendidikan tinggi pariwisata yang ada saat ini supaya mampu meningkatkan kualitasnya agar mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan dan tuntutan industri pariwisata saat ini, yaitu lulusan yang tidak hanya memahami keterampilan teoritis konseptual tetapi juga memiliki keterampilan managerial teknis-praktis di bidang pariwisata sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

Di Indonesia terdapat sejumlah lembaga pendidikan tinggi vokasi pariwisata dalam berbagai bentuk kelembagaan. Diantaranya ada yang berbentuk sekolah tinggi, akademi, politeknik dan program studi di sebuah universitas. Dari sekian banyak lembaga pendidikan tinggi pariwisata tersebut terdapat sejumlah perguruan tinggi pariwisata yang dikelola oleh pihak swasta dengan jumlah yang cukup banyak, tersebar di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan jumlahnya cenderung bertambah setiap tahun, kecuali saat pandemic Covid 19 selama 2 tahun terakhir ini. Sebagian besar dari lembaga pendidikan tinggi pariwisata tersebut berbentuk Akademi Pariwisata atau AKPAR. Kecenderungan bertambahnya perguruan tinggi pariwisata yang baru ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata seiring dengan berkembangnya industri pariwisata di berbagai daerah di Indonesia. Hampir setiap pemerintah daerah di kabupaten dan kota berlomba untuk membuka dan

mengembangkan potensi wisata di daerahnya masing masing. Berbagai obyek wisata dan sarana pendukungnya, seperti hotel dan restoran terus dibangun. Sayangnya pertumbuhan jumlah perguruan tinggi pariwisata di berbagai daerah tersebut ternyata tidak dibarengi dengan mutu pendidikan yang dikelolanya, sehingga mutu lulusan yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para *stakeholders* dan dunia industri pariwisata. Secara umum mutu lulusan akan bergantung kepada mutu lembaga pendidikannya. Salah satu cara mudah untuk mengetahui tinggi rendahnya mutu suatu lembaga pendidikan tinggi dapat dilihat dari akreditasi yang dimilikinya.

Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2020 (BAN-PT 2020), terdapat 45 lembaga pendidikan tinggi pariwisata terakreditasi, dalam bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata, Politeknik Pariwisata, dan Akademi Pariwisata. Dari sejumlah perguruan tinggi pariwisata yang terakreditasi itu hanya ada 1 yang memiliki akreditasi Unggul (A), 18 baik sekali (B) dan sisanya 26 PT terakreditasi baik (C). Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.3 Akreditasi Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata

| No. | Bentuk Lembaga | Akreditasi / Jumlah | | |
|--------------|----------------|---------------------|-------------|------|
| | | Unggul | Baik Sekali | Baik |
| 1. | Sekolah Tinggi | 1 | 6 | 8 |
| 2. | Politeknik | | 8 | 3 |
| 3. | Akademi | | 4 | 15 |
| Jumlah Total | | 1 | 18 | 26 |

Sumber : Sekretariat@banpt.or.id, 2020

Adapun untuk standar internasional, sertifikasi standar mutu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Perhotelan dan Pariwisata dikeluarkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) melalui Themis Foundation yang mengembangkan Tourism Education Quality (TedQual). Standar mutu pada setiap aspek yang dipersyaratkan oleh UNWTO merupakan syarat untuk memperoleh sertifikat TedQual. Dikutip dari laman resminya (unwto.org, 2021). saat ini ada sejumlah 93 lembaga pendidikan tinggi pariwisata di dunia

Deden Saepudin, (2023)

MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

yang telah mendapatkan serifikasi internasional tersebut. Untuk kawasan Asia Pasifik, terdapat 33 lembaga serupa yang mendapatkan sertifikasi dari Tourism Education Quality. Sementara di Indonesia sampai dengan tahun 2021 ini baru ada 6 lembaga pendidikan pariwisata yang sudah memperolehnya. Masih sangat sedikit karena memang tidak mudah untuk memperolehnya. Beragam kendala, baik teknis, sistem, anggaran maupun SDM yang dimiliki menjadi hambatan pencapaian standar kualitas yang ditetapkan oleh TedQual tersebut. .

Kondisi masih rendahnya kualitas lembaga pendidikan tinggi pariwisata saat ini tentu banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan adalah sebuah sistem yang membutuhkan dukungan berbagai macam sub sistem lainnya. Sehingga dalam menentukan kualitas suatu lembaga pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang dikelolanya, terlebih dahulu perlu dilihat apakah komponen-komponen sub sistem yang terdapat dalam sistem pendidikan tersebut juga sudah bermutu. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa proses pendidikan itu merupakan transformasi yang melibatkan berbagai sub sistem pendidikan, diantaranya kepemimpinan lembaga, kesesuaian kurikulum, kelengkapan fasilitas sekolah berupa sarana prasarana, ketersediaan sumber dan bahan belajar, serta tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh peserta didik dan *stakeholders* lainnya.

Khusus bagi pendidikan tinggi vokasi, termasuk bidang pariwisata, salah satu sub sistem yang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan yang berdampak pada kualitas lembaga pendidikan vokasi secara keseluruhan adalah kegiatan pembelajaran praktik. Baik tidaknya kualitas sebuah lembaga pendidikan vokasi dapat terlihat dari kemampuannya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran praktik bagi peserta didiknya. Dapat dikatakan bahwa “ruh” pendidikan vokasi terletak pada kegiatan pembelajaran praktiknya. Indikator pentingnya kegiatan belajar praktik di sekolah vokasi dapat dilihat dari proporsi pembelajaran praktik yang lebih banyak dibanding dengan pembelajaran teori. Sebagaimana diketahui bahwa sekolah vokasi adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan

keahlian yang lebih berorientasi pada penerapan ilmu. Lulusannya harus berkompeten dan terampil dalam bekerja. Model pembelajaran sekolah vokasi berbeda dengan model pembelajaran sekolah akademik pada umumnya. Jika pada sekolah akademik menekankan ilmu pengetahuan, maka sekolah vokasi menekankan pada pembelajaran yang terstruktur pada keahlian yang lebih *driven* atau terarah. Pada intinya, sekolah vokasi diarahkan untuk mencetak lulusan yang siap bekerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini. Sehingga dapat dipahami apabila 60 - 70 persen pembelajaran sekolah vokasi merupakan pembelajaran praktik dan sisanya, 30 – 40 % merupakan pembelajaran teori.

Pembelajaran praktik merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan melatih dan membimbing peserta didik untuk dapat menguasai suatu keterampilan dengan menggunakan berbagai metode dan peralatan yang sesuai dengan jenis keterampilan yang akan diberikan. Secara teoritis pembelajaran praktik diartikan oleh Hegarty-Hazel (dalam Lazarowitz & Tamir, 1994, hlm. 114) sebagai suatu bentuk kerja praktek yang bertempat dalam lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik terlibat dalam pengalaman belajar dan berinteraksi dengan peralatan untuk mengobservasi serta memahami suatu fenomena. Sementara Hamzah, (2008, hlm. 200), Sudjana (2005: hlm.157-158), Roestiyah, (2001, hlm. 88), secara umum menyatakan pembelajaran praktik sebagai proses pembelajaran yang melibatkan kemampuan motorik atau gerak di tempat kerja atau lapangan dengan tujuan melatih kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya untuk dilakukan di kehidupan nyata atau pekerjaan, atau tugas yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dalam pelaksanaannya pembelajaran praktik terbagi dalam dua bentuk metode sebagaimana dijelaskan David A. Jacobsen et. all (2009, hlm. 203) bahwa metode pembelajaran praktik dibagi menjadi dua, yakni metode praktik terbimbing dan praktik mandiri. Praktik terbimbing merupakan metode praktik dalam pembelajaran, guru memberikan umpan balik agar siswa mengetahui cara praktik sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Sedangkan praktik mandiri yakni

metode pembelajaran dengan memberikan kesempatan siswa untuk melakukan praktik secara mandiri.

Mengingat pentingnya kegiatan pembelajaran praktik bagi mahasiswa di perguruan tinggi vokasi, Pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi terus mendorong dinamika perguruan tinggi vokasi untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran praktiknya agar sesuai dengan kebutuhan pembelajar, masyarakat dan industri. Dengan kata lain pendidikan vokasi itu diarahkan supaya bisa *link and match* dengan industri pengguna lulusannya. Pentingnya pendidikan vokasi yang *link and match* dengan industri ini dimunculkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024. Disebutkan bahwa target kinerja untuk layanan pendidikan tinggi vokasi diantaranya adalah dalam bentuk peningkatan kompetensi dosen bersertifikasi industri yang dapat mengoptimalkan potensi peserta didik melalui kegiatan perkuliahan bersifat *instructional effect* (pengetahuan dan keterampilan), dengan menerapkan strategi pembelajaran langsung (*direct instruction*) secara proporsional sesuai tuntutan kebutuhan Industri dan dunia kerja (IDUKA), peningkatan fasilitas perkuliahan (utamanya kelengkapan fasilitas laboratorium atau sarana praktikum) setaraf dengan aktivitas industri, kompetensi dosen penyelenggara Pendidikan tinggi vokasi dengan jalinan kemitraan strategis secara *link and match* dengan IDUKA. Penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi vokasi yang adaptif dan mampu cepat berimprovisasi dengan kecepatan pergerakan dunia industri sehingga mampu menghasilkan lulusan Pendidikan tinggi vokasi yang siap berkerja dengan level keterampilan tertentu sesuai keahlian pada prodi yang dipersyaratkan oleh industri. (vokasi.kemdikbud.go.id. 2020). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan vokasi kegiatan pembelajaran harus lebih didekatkan dengan kondisi dan kebutuhan industri. Tidak heran apabila saat ini muncul istilah “perkawinan massal” pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri yang diluncurkan oleh Kemendikbud dan terus disosialisasikan oleh Dirjen Pendidikan vokasi dalam berbagai kesempatan (Antarnews.com. 2020).

Deden Saepudin, (2023)

MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Implementasi “perkawinan massal” atau *link and match* yang disematkan pada pendidikan vokasi dan dunia industri akan nampak jelas pada kegiatan pembelajaran praktik. Sinkronisasi perangkat pembelajaran oleh sekolah dan industri akan membentuk karakteristik pembelajaran praktik yang terkait erat pada standar kompetensi lulusan yang memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan karakteristik kompetensi yang dipersyaratkan. Dikaitkan dengan kegiatan pengelolaan pembelajaran praktik di Perguruan Tinggi vokasi pariwisata, maka karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi tersebut menjadi melekat pada strategi pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi sebagaimana tercantum dalam KKNi bidang pariwisata. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk kualitas lulusan yang terampil karena memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Merujuk pada paparan di atas, maka Perguruan Tinggi vokasi bidang pariwisata dituntut untuk mampu menghadirkan kegiatan pembelajaran praktik yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan, memenuhi karakteristik pembelajaran, dan memiliki kurikulum yang *link and match* dengan industri. Perguruan Tinggi yang mampu menyelenggarakan pembelajaran praktik yang bermutu akan menghasilkan capaian pembelajaran yang bermutu, dan capaian pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula, yaitu mahasiswa yang mandiri, memiliki kompetensi, dan siap kerja bukan siap *training* di industri. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah studi, diantaranya hasil penelitian Jayano dan Halfi Indra (2019), yang menyatakan bahwa kegiatan praktik kerja Industri dan Pembelajaran di laboratorium praktik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap *employability skill* (peningkatan kemampuan kerja) pada mahasiswa program studi perhotelan di Politeknik Pariwisata Medan. Hasil penelitian Siti Hamidah (2012), menyatakan bahwa melalui kegiatan pembelajaran praktik, baik dalam kerja kelompok maupun individu, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja tanggung jawab persiapan diri, persiapan kerja,

proses produksi, penyajian, dan berkemas dengan kriteria antara hampir selalu dan konsisten. Demikian halnya dengan kinerja disiplin telah memberi makna bagi peningkatan penguasaan *soft skills* antara hampir selalu dan konsisten.

Mengingat penting dan urgensinya kegiatan pembelajaran praktik dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja para peserta didik sebagaimana dipaparkan di atas, maka Perguruan Tinggi sebagai pihak penyelenggara pendidikan bertanggung jawab untuk meningkatkan standar kinerjanya supaya mampu mengelola kegiatan pembelajaran praktik yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan dan diharapkan oleh mahasiswanya. Komponen kualitas pembelajaran praktik yang diselenggarakan tidak cukup hanya sekedar pada macam atau bentuk pembelajaran praktik yang diberikan, tetapi juga sangat tergantung pada sistem pengelolaan mutu (*quality management*) yang dijalankannya. Konsep pembelajaran praktik yang bermutu lebih menekankan pada aspek kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mutu secara berkelanjutan (*Quality improvement*) sehingga dibutuhkan manajemen mutu pembelajaran praktik yang tepat guna sebagai strategi pengelolaan mutu dalam menghasilkan lulusan yang bermutu sebagai produk jasa pendidikan.

Pengelolaan kegiatan pembelajaran praktik yang dilakukan dengan strategi yang tepat terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar dan kreatifitas pada peserta didik atau mahasiswa pembelajar. Sejumlah penelitian telah membuktikannya, sebagaimana penelitian R. Mursid (2013), yang menunjukkan bahwa hasil Pengembangan Model Pembelajaran Praktik berorientasi produk terbukti efektif dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran praktik dan dapat menciptakan iklim belajar yang memposisikan mahasiswa sebagai *centre of learning*, memotivasi belajar mahasiswa melalui ide-ide yang konstruktif, mendorong dan membangkitkan keberanian belajar dan bekerja yang didasari komitmen yang tinggi dan berdisiplin, meningkatkan kecepatan belajar, motivasi belajar, semangat belajar, kerja sama kelompok, kreatifitas, dan inovasi. Sedangkan hasil penelitian Rahdiyanta dkk. (2016), membuktikan bahwa

penerapan model pembelajaran praktik berbasis *Collaborative Skill* mampu meningkatkan sikap dan kualitas hasil belajar para mahasiswanya.

Fenomena kegiatan pembelajaran praktik di Perguruan Tinggi Vokasi, khususnya bidang pariwisata, sebagaimana telah dipaparkan di atas, telah menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh dan berkontribusi dalam bentuk keilmuan. Sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu penulis, yaitu Administrasi Pendidikan, maka fokus penelitian merujuk pada empat pilar utama Administrasi Pendidikan, yaitu *Management, Leadership, Planning, dan Policy*. Penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan kegiatan pembelajaran praktik di Perguruan Tinggi vokasi bidang pariwisata, maka topik ini termasuk pada pilar *management*.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya penulis melakukan penelitian pendahuluan dengan observasi ke sejumlah Perguruan Tinggi Pariwisata, baik negeri maupun swasta yang berada di Jawa Barat. Provinsi ini memiliki jumlah perguruan tinggi pariwisata terbanyak dibanding provinsi lain. Sejumlah Perguruan Tinggi Pariwisata, khususnya yang berbentuk Akademi, tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Diantara sejumlah Akademi Pariwisata tersebut, peneliti memilih Akademi Pariwisata NHI Bandung dan Akademi Pariwisata Nusantara Jaya Depok sebagai tempat pelaksanaan penelitian studi kasus ini. Dipilihnya dua Akademi Pariwisata tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua lembaga pendidikan ini termasuk yang memiliki Akreditasi BAN PT yang baik, yaitu B, akan tetapi di sisi lain kedua AKPAR ini memiliki karakteristik kondisi yang berbeda.

AKPAR NHI Bandung memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak di atas 300 orang, memiliki lahan dan bangunan kampus sendiri, serta ruang belajar praktik yang cukup luas meski masih menyewa. Sedangkan AKPAR Nusantara Jaya Depok memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 100 orang, lahan dan bangunan kampus masih menyewa, serta tidak memiliki ruang belajar praktik yang memadai. Kondisi kedua AKPAR ini merupakan cerminan kondisi AKPAR secara keseluruhan yang ada dan tersebar di berbagai kota di Indonesia saat ini,

sehingga kedua AKPAR ini bisa mewakili kondisi dan permasalahan yang dihadapi AKPAR selama ini.

Beberapa temuan hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui kunjungan observasi dan wawancara dengan sejumlah pihak terkait pelaksanaan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantra Jaya Depok, ditemukan sejumlah permasalahan yang bisa dikategorikan sebagai kesenjangan atau “*gap*” antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran praktik, diantaranya sebagai berikut:

1. Masalah kompetensi dan profesionalisme dosen/instruktur praktik; Diantaranya masih terdapat dosen yang tidak berlatar belakang pendidikan vokasi perhotelan atau berlatang belakang pendidikan vokasi tapi belum pernah bekerja di industry..
2. Keterbatasan fasilitas tempat belajar praktik; Rasio luas tempat dan jumlah peralatan praktik yang belum sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa yang menggunakan;
3. Kondisi, Jenis dan Teknologi peralatan praktik yang tidak sesuai lagi dengan apa yang digunakan di industri (*out of date*);
4. Jumlah jam (waktu) pembelajaran praktik relatif masih sedikit, sehingga minim proses pengulangan pembelajaran.
5. Tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan mutu pembelajaran praktik masih terpusat pada ketua prodi dan ketua PPM. Karena minimnya SDM yang memahami manajemen mutu dan berkomitmen terhadap pelaksanaan manajemen mutu pembelajaran praktik
6. Implementasi manajemen mutu masih terbatas pada kegiatan administratif
7. Belum lengkapnya dokumen mutu (SOP, manual mutu, struktur organisasi mutu, dll.) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran praktik.
8. Standar mutu pembelajaran praktik belum konsisten, baik dilihat dari jumlah waktu belajar, jumlah dosen dan peralatan maupun metode pembelajaran.

9. Kegiatan pembelajaran praktik masih bergantung kepada pola dan materi individual dari dosen/instruktur yang mengajar
10. Belum adanya keterlibatan pihak industri dalam kegiatan pembelajaran praktik, baik dalam penyusunan kurikulum maupun dalam pelaksanaan pembelajaran praktik.

Gambaran kondisi yang terjadi di lapangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok secara umum bisa dikatakan masih belum optimal. Hal ini bisa terjadi dikarenakan keterbatasan fasilitas pembelajaran praktik dan konsep atau strategi manajemen mutu pembelajaran praktik yang diterapkan belum sesuai dengan kebutuhan atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penerapan konsep manajemen mutu yang tepat merupakan langkah awal dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan secara komprehensif, termasuk di dalamnya kegiatan pembelajaran praktik, untuk memenuhi standar mutu capaian pembelajaran dan mutu kompetensi lulusan yang sesuai kebutuhan para *Stakeholders* secara cermat. Hal ini menjadi penting karena tanpa manajemen yang baik kualitas pendidikan tidak bisa berfungsi optimal. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian Bendriyanti pada tahun 2015 dan Kemenuh pada tahun 2020 yang menunjukkan pentingnya manajemen mutu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi lulusan di perguruan tinggi. Adapun upaya yang bisa diimplementasikan oleh lembaga pendidikan tinggi supaya dapat mencapai hal tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan konsep manajemen mutu yang didasari oleh kebutuhan para lulusan dan pengguna lulusan serta melibatkan semua unsur dan aspek yang berkaitan dengan capaian pembelajaran.

Berdasarkan paparan permasalahan yang dihadapi AKPAR dan temuan beberapa hasil penelitian yang berkembang, studi ini merujuk pada masalah pentingnya mengelola kegiatan pembelajaran praktik supaya mampu meraih capaian pembelajaran yang bermutu sesuai standar kompetensi lulusan yang dipersyaratkan. Keberhasilan mewujudkan capaian pembelajaran yang bermutu

merupakan target dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, dan kemampuan melahirkan lulusan yang bermutu merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Pariwisata. Untuk itu dibutuhkan perhatian serius dalam mengelola kegiatan pembelajaran praktik secara jelas dan terukur dengan pengawalan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam manajemen mutu perguruan tinggi. Pembelajaran praktik yang bermutu bisa terlaksana apabila perguruan tinggi memiliki konsep atau strategi pengelolaan mutu yang tepat dan mampu melaksanakan konsep manajemen mutu tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya menemukan konsep atau strategi manajemen mutu dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran praktik harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya perguruan tinggi pariwisata dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas lulusannya sebagaimana yang diharapkan oleh banyak pihak selama ini.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran praktik di perguruan tinggi pariwisata, khususnya di Akademi Pariwisata NHI Bandung dan Akademi Pariwisata Nusantara Jaya Depok, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, secara umum masih belum memenuhi standar mutu yang diharapkan, sehingga raihian capaian pembelajaranpun belum optimal. Dengan demikian diperlukan suatu upaya perbaikan kualitas kegiatan pembelajaran praktik secara berkelanjutan melalui perumusan suatu konsep atau model manajemen mutu yang tepat sesuai dengan tujuan dan target capaian pembelajaran praktik yang dipersyaratkan.

Penerapan konsep manajemen mutu pembelajaran praktik yang tepat akan mempermudah terjadinya peningkatan kualitas capaian pembelajaran, dan dengan capaian pembelajaran yang berkualitas diyakini akan menghasilkan lulusan yang berkualitas pula, yaitu lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri dan dunia kerja (IDUKA). Lebih jauh lagi, hal ini akan berkontribusi pada lahirnya SDM pariwisata bermutu yang memiliki daya saing di dunia industri pariwisata dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus masalah penelitian pada studi ini mengerucut pada masalah pentingnya mengelola mutu pembelajaran

praktik di Perguruan Tinggi vokasi bidang pariwisata. Diawali dengan mendeskripsikan kegiatan pembelajaran praktik yang selama ini dilaksanakan di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok berdasarkan analisis fungsi produksi pendidikan (*education production function*), yaitu *Context, Input, Process, Output, and Outcomes*. Kemudian menganalisis implementasi manajemen mutu pembelajaran praktik yang selama ini dilakukan dengan menggunakan konsep perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) “Deming’s Wheel”, yaitu *Plan, Do, Check, Act*, (PDCA) yang digagas oleh William Edwards Deming (1982). Selanjutnya, berdasarkan temuan penelitian dengan dua pendekatan di atas, dirumuskan model hipotetik manajemen mutu pembelajaran praktik berbasis kompetensi terintegrasi dengan industri di Perguruan Tinggi vokasi bidang pariwisata. Model ini merujuk kepada model pembelajaran berbasis kompetensi (CBT) dari Anane, (2013) dan konsep pembelajaran terintegrasi dari Fogarty (1991).

Berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri dunia kerja. Secara teoritis hal ini dinyatakan oleh Anane (2013, hlm. 119), bahwa :

Competency Based Training (CBT) is an industry and demand driven (outcomes-based) education and training programme based on well defined industry generated standards (occupational standards). These industry standards are the basis upon which the program (curriculum), assessment and learning materials are designed and developed.

Maksudnya pelatihan berbasis kompetensi (CBT) adalah program pendidikan dan pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan standar yang ditetapkan oleh industri. Standar industri ini adalah dasar penyusunan program (kurikulum), penilaian dan materi pembelajaran yang akan dikembangkan. Selanjutnya Ia menunjukkan empat elemen kunci spesifikasi standar unit pembelajaran yang menjadi dasar sertifikasi kompetensi, yaitu 1) *Learning*

Outcomes (hasil pembelajaran), kompetensi yang bisa dikuasai peserta didik, 2) *Performance Criteria* (kriteria kinerja), apa yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta didik, 3) *Range Statement* (parameter pembelajaran), apa yang harus dicapai oleh peserta didik agar dapat melakukan 4) *Evidence Requirement* (bukti persyaratan): Ini adalah kriteria penilaian berupa proses mengumpulkan bukti kinerja peserta didik untuk menilai sejauh mana peserta didik telah memenuhi persyaratan kinerja (Anane, 2013, hlm. 120-121).

Adapun maksud terintegrasi dengan industri merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Fogarty (1991, hlm. 61), bahwa pembelajaran terpadu (*Integrated learning*) merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Bermakna disini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terintegrasi mahasiswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antara keterampilan yang dipelajari di Sekolah dengan keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat atau industri. Selanjutnya Fogarty menambahkan bahwa terdapat 10 model dalam pembelajaran terintegrasi (*integrated learning*), diantaranya adalah model keterkaitan (*the connected Model*) yang dianggap paling sesuai dengan penelitian ini. Ia menjelaskan bahwa “*the connected model focuses on making explicit connections with each subject area, connecting one topic to the next, connecting one concept to another, connecting a skill to related skill, connecting one day’s work to the next, or even one semester’s ideas to the next*”. (Fogarty, 1991, hlm. 65). Berdasarkan teori ini, maka peneliti mengasumsikan bahwa pada prinsipnya pembelajaran praktik itu harus terhubung atau terkoneksi dengan dunia industri, sehingga apa yang dipelajari mahasiswa sesuai dengan apa yang kelak dibutuhkan saat bekerja di industri. Sehingga dalam implementasinya pihak sekolah harus melibatkan industri dalam merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran praktik, misalnya meminta masukan pihak industri saat penyusunan kurikulum, menghadirkan praktisi industri sebagai pengajar, sinkronisasi

teknologi dan peralatan praktik, mengirimkan mahasiswa praktik di industri untuk magang, dan lain sebagainya.

Peneliti meyakini bahwa model hipotetik yang diajukan dalam studi ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga hal ini menjadi temuan baru atau kebaruan (*Novelty*) dalam dunia Administrasi Pendidikan, khususnya yang terkait dengan manajemen mutu pembelajaran praktik di Perguruan Tinggi vokasi bidang pariwisata. Peneliti berasumsi apabila model hipotetik ini diimplementasikan dan dikembangkan di Perguruan Tinggi Pariwisata untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran praktik maka akan diraih capaian pembelajaran yang berkualitas, yang memenuhi standar mutu dan kualifikasi kompetensi dalam KKNI sebagaimana diharapkan dan disyaratkan. Asumsi penelitian tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1 Visualisasi Asumsi Penelitian



Sumber: Visualisasi oleh Penulis, 2023

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah tentang belum optimalnya implementasi manajemen mutu pembelajaran praktik dalam menguatkan keberfungsian meningkatkan capaian pembelajaran mahasiswa di Perguruan Tinggi vokasi bidang pariwisata, yaitu di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah penelitian dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 - 2021?. Secara spesifik rumusan pertanyaan penelitian tersebut diuraikan menjadi :
 - a. Bagaimana *context* kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?
 - b. Bagaimana *input* kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?
 - c. Bagaimana *process* kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?
 - d. Bagaimana *output* kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?
 - e. Bagaimana *outcomes* kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?
2. Bagaimana penerapan manajemen mutu pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 - 2021?. Secara spesifik rumusan pertanyaan penelitian tersebut diuraikan menjadi :
 - a. Bagaimana perencanaan (*plan*) kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?

- b. Bagaimana pelaksanaan (*do*) kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?
- c. Bagaimana pengawasan (*check*) kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?
- d. Bagaimana tindak lanjut (*act*) kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok tahun 2019 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran utuh tentang kegiatan pembelajaran praktik dan menganalisis penerapan manajemen mutu pembelajaran praktik di Perguruan Tinggi vokasi bidang pariwisata.

2) Tujuan Khusus

- a. Teridentifikasinya gambaran kegiatan pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok pada tahun 2019–2021
- b. Teranalisisnya implementasi dan keberfungsian manajemen mutu pembelajaran praktik di AKPAR NHI Bandung dan AKPAR Nusantara Jaya Depok pada tahun 2019 - 2021 ;
- c. Terbangunnya Model hipotetik manajemen mutu pembelajaran praktik berbasis kompetensi dan terintegrasi industri di Perguruan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata yang diberi nama model BERKONGSI sebagai kebaruan atau *novelty* yang dihasilkan melalui penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan administrasi pendidikan, khususnya bidang manajemen mutu pendidikan dalam aspek pengelolaan kegiatan pembelajaran praktik. Lebih khusus lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan konsep-konsep teori peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi vokasi pariwisata yang saat sekarang ini sedang menjadi perhatian pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, khususnya dunia usaha dan dunia industri pariwisata dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata nasional di kancah internasional.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para pengelola mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran praktik di Perguruan Tinggi Pariwisata. Model hipotetik manajemen mutu pembelajaran praktik berbasis kompetensi terintegrasi dengan industri pariwisata yang dihasilkan dalam penelitian ini diyakini bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran praktik yang berdampak kepada meningkatnya kualitas pendidikan dan kualitas lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata, khususnya yang berbentuk Akademi. Tingginya mutu lulusan akan berdampak kepada tingginya kepercayaan industri dan dunia kerja kepada lulusan yang dihasilkan Perguruan Tinggi vokasi Pariwisata.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UPI, penulisan disertasi ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut.

1. Bab I merupakan bab pendahuluan, di dalamnya disajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian yang disajikan ke dalam 3 pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi.
2. Bab II merupakan bab kajian pustaka atau landasan teori, di dalamnya disajikan kajian teori yang mengungkap konsep teori yang berkaitan dengan manajemen mutu pembelajaran praktik di Perguruan Tinggi Pariwisata,

Deden Saepudin, (2023)

MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

3. Bab III merupakan bab yang membahas metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian, pendekatan penelitian dengan sajian desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan teknis analisis data.
4. Bab IV adalah bab yang membahas temuan dan pembahasan. Dalam bab empat ini dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan didasarkan pada temuan data lapangan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pada konsep teori yang telah diuraikan pada bab II.
5. Bab V adalah bab terakhir yang memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada Bab V ini dipaparkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan implikasi dari hasil penelitian serta rekomendasi mengenai hal hal yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tindak lanjut dari penelitian ini.